

## Implementasi tata kelola Pembiayaan Menuju Pendidikan Bermutu

Muhammad Baihaqi<sup>1</sup>, Muhammad Mualvi R. A<sup>2</sup>  
Universitas KH Mukhtar Syafa'at Blokagung Banyuwangi<sup>1,2</sup>.  
Email : [almurtasyid@gmail.com](mailto:almurtasyid@gmail.com), [rmualvi@gmail.com](mailto:rmualvi@gmail.com)

**Abstract:** Education financing is one of the central systems in education, finance is part of supporting the implementation of education because it involves funding education implementation activities. Therefore, this study aims to analyze the implementation of financing governance towards quality education. This study uses a qualitative approach by using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results of this study show that the implementation of the Wustho Mudari Education Unit Financing (SPM) governance towards quality education in education financing in accordance with the school financial management system must be included in the implementation of education finance, especially in the form of education concepts, budgeting, classifying activities, determining standardization and determining unit prices in education budgeting. There are three important stages in education financial management, namely; (1) planning, (2) implementation, (3) evaluation. If applied to financial management, the three phases are the financial planning phase (budgeting), the implementation phase (accounting), and the evaluation or audit phase. context. With the existence of an education financial management system, it is expected to support and ensure the development of the quality of education and the process of organizing teaching and learning activities.

**Keywords:** Implementation of financing governance, quality education

**Abstrak:** Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sistem sentral dalam pendidikan, keuangan merupakan bagian dari penunjang penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut pendanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi tata kelola Pembiayaan Menuju Pendidikan yang Bermutu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola Pembiayaan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustho Menuju Pendidikan yang Bermutu dalam pembiayaan pendidikan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan sekolah harus dimasukkan dalam penyelenggaraan keuangan pendidikan, khususnya dapat berupa konsep pendidikan, penganggaran, pengklasifikasian kegiatan, penetapan standardisasi dan penetapan harga satuan dalam penganggaran pendidikan. Ada tiga tahapan penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan, yaitu; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi. Jika diterapkan pada pengelolaan keuangan, ketiga fase tersebut adalah fase perencanaan keuangan (penganggaran), fase pelaksanaan (akuntansi), dan fase evaluasi atau audit. konteks. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan pendidikan diharapkan dapat mendukung dan menjamin perkembangan mutu pendidikan serta proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

**Kata Kunci::** Implementasi tata kelola Pembiayaan, pendidikan bermutu

## Introduction

Pendidikan merupakan hak bagi setiap individu, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Adapun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara <sup>1</sup>.

Kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tentu tidak terlepas dari pembiayaan. Apabila pengelolaan pembiayaannya dikelola dengan baik maka terciptalah efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan pembiayaan tersebut. Sedangkan apabila pembiayaan tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan timbul berbagai macam permasalahan yang merugikan terhadap lembaga pendidikan atau organisasi tersebut <sup>2</sup>.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>1</sup> Tata kelola atau manajemen hampir dipastikan selalu ada dalam setiap organisasi baik perusahaan maupun lembaga pendidikan. Tanpa adanya manajemen atau pengelolaan yang baik dapat dipastikan bahwa tugas pokok dan fungsi antara seluruh stakeholder yang ada di sebuah organisasi akan kacau berantakan karena tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu, pentingnya manajemen yaitu agar organisasi berjalan sesuai dengan harapan yang telah dituangkan ke dalam tujuan sehingga terbentuklah visi dan misi sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan <sup>3</sup>.

Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam hal ini, maupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah

---

<sup>1</sup> Masditou, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu," *Jurnal ANSIRU PAI* 1, no. 2 (2017): h. 130.

<sup>2</sup> Charge Name et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. 2 (2021): 6.

<sup>3</sup> Ibid.

dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Standar pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Pada Bab IX pasal 62 dari PP tersebut disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan disekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadair serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik. Pembiayaan<sup>4</sup>.

Pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang dapat menunjang segala aktivitas pendidikan baik formal maupun informal. Pembiayaan menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran penting atas berjalannya proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan pembiayaan memadai akan berakibat pada berlangsungnya pembelajaran yang maksimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Tarmizi dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala kuneng Kabupaten Pidie”, yang menyebutkan bahwa pengawasan yang rendah terhadap penggunaan pendidikan akan mengakibatkan sumber-sumber biaya pendidikan yang diperoleh belum memberikan dampak yang optimal. Karena pemanfaatan biaya yang kurang tepat dengan tidak memberikan prioritas bagi faktor- faktor yang benar-benar dapat memacu peningkatan prestasi<sup>5</sup>.

Sebaliknya, tanpa pembiayaan, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. “Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan, merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain”.<sup>4</sup> Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan,

---

<sup>4</sup> Anggita Rizki Defiani Hasibuan, “Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020,” *Juripol* 4, no. 1 (2021): 304–309.

<sup>5</sup> Ibid.

terutama di madrasah/sekolah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah/sekolah diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan tepat pada sasaran kebutuhan, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. “pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan madrasah/sekolah”. Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen pendidikan.<sup>6</sup>

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keadilan berarti besarnya biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah masing-masing. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dengan keluaran dengan hasil, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan serta hasil. Akuntabilitas publik yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan. Transparansi artinya adanya ketebukaan dalam pengelolaan biaya pendidikan yaitu keterbukaan sumber pendapatan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengetahuinya.<sup>7</sup>

Dalam Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas. Mulai dari tahap perencanaan, penggunaan biaya pendidikan, pengawasan serta pertanggungjawaban atas penggunaan biaya pendidikan. Sehingga, dapat membantu mengurangi permasalahan-permasalahan pembiayaan pendidikan yang sering terjadi di lembaga pendidikan sekolah. Dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dengan baik.<sup>8</sup>

## **Theoretical Review**

Azyumardi Azra dalam Badrudin (2014) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara

---

<sup>6</sup> Masditou, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu.”

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Jaenudin Jaenudin, Muhammad Nur Rianto Al Arif, and Iif Fikriyati Ihsani, “Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum Pada Universitas Islam Negeri,” *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 62. The 4th ICO EDUSHA 2023  
Vol. 4 .No.1 December 2023  
E-ISSN. 2775-930X

efektif dan efisien. Melalui pendidikan diharapkan lahirnya generasi muda yang berkecakapan hidup, berkualitas, memiliki wawasan yang luas bertanggung jawab dan berkepribadian baik demi kepentingan di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tentu tidak terlepas dari pembiayaan. Apabila pengelolaan pembiayaannya dikelola dengan baik maka terciptalah efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan pembiayaan tersebut. Sedangkan apabila pembiayaan tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan timbul berbagai macam permasalahan yang merugikan terhadap lembaga pendidikan atau organisasi tersebut.<sup>10</sup>

Manajemen pendidikan bertanggung jawab untuk menyediakan anggotanya dengan akses ke fasilitas belajar dan terus mengadaptasi praktiknya untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan tujuan individu yang terus berkembang baik di dalam maupun di luar organisasi. Manajemen pendidikan yang efektif karena misinya sejalan dengan misi madrasah yang efektif, yaitu terjadinya pembelajaran yang berkesinambungan dan selalu mengutamakan pelibatan seluruh staf untuk belajar pada semua jenjang dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut: (a). Dalam suatu organisasi pendidikan, tata tertib, tata cara, dan aturan main perlu menjadi budaya (budaya akademik) yang harus diikuti oleh semua pihak sehingga dapat memberikan motivasi belajar. Hal ini ditandai dengan munculnya; Keterbukaan terhadap pengalaman; Tidak menghindar dari kesulitan; Ada evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi untuk pengembangan lebih lanjut, dan ada penekanan pada pentingnya mengatasi tantangan tersebut. (2) Strategi organisasi menyatakan bahwa pembelajaran merupakan sumber keunggulan strategis yang berkelanjutan; (3) Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk memiliki struktur organisasi yang fleksibel; (4) Sistem informasi dalam organisasi pembelajar sangat akurat, diperbarui secara tepat waktu, dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya, dan disajikan dalam format yang mudah dipahami. Dan terakhir, nomor lima dalam daftar adalah bahwa individu yang memenuhi syarat perlu memimpin sebuah lembaga pendidikan.<sup>11</sup>

Pembiayaan pendidikan adalah anggaran yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu lembaga pendidikan. Biaya pendidikan bersifat budgetair dan non budgetair. Biaya pendidikan yang bersifat budgetair adalah pembiayaan yang terhitung dan terukur secara rasional berdasarkan

---

<sup>9</sup> Name et al., “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.”

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Nurul Huda, “Sistem Administrasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022): 16–31.

tingkat kebutuhan antara pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan biaya non budgetair adalah biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh murid, orangtua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan.<sup>12</sup>

## **Methods**

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang mampu menemukan dan mengembangkan objek penelitian dari para informan. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan teknik tersebut, informan pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah, bendahara sekolah, dan guru-guru.

Penelitian dilaksanakan di Satuan Pendidikan Muadalah(SPM) Wustho Darussalam Blokagung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data oleh peneliti. Analisis data

dilakukan dengan reduksi data pada data-data yang tidak relevan dengan masalah penelitian, penyajian data yang terstruktur, dan analisis penyusunan kesimpulan. Dengan teknik analisis data tersebut, peneliti mendapatkan deskripsi manajemen pembiayaan pada masa Covid-19 di pondok pesantren Daarul Ilmi Tarakan.

## **Results and Discussion**

Keuangan dan pembiayaan memiliki potensi serta peranan yang penting dalam kegiatan pendidikan. Disebut sebagai potensi mengingat bahwa keuangan menjadi hal yang melekat pada lembaga, selain itu dapat ditingkatkan pendapatannya. Adapun peranan keuangan dan pembiayaan hampir melekat pada berbagai kegiatan yang diselenggarakan di pesantren, dengan kata lain bahwa semua program sangat memerlukan dan membutuhkan anggaran biaya keuangan. Sehingga anggaran lembaga yaitu komponen keuangan harus dikelola dengan sebaik- baiknya, agar

---

<sup>12</sup> Jaenudin, Al Arif, and Ihsani, "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum Pada Universitas Islam Negeri."

keuangan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan.

Penelitian dilakukan di Satuan Pendidikan Muadalah Wustho merupakan sekolah yang berbasis pesantren yang ijzaahnya diakui secara nasional yang setara dengan SLTP. Satuan pendidikan muadalah (SPM) Wustho Darussalam Blokagung Banyuwangi merupakan institusi baru dibanding institusi-institusi lain di bumi Darussalam Blokagung. Dalam kondisi demikian itu, peneliti datang dan hadir di lembaga pendidikan untuk menggali data dan informasi manajemen pembiayaan dalam pengelolaan pesantren. Peneliti bertemu dengan kepala madrasa, bendahara, dan guru-guru.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penting yang menambah informasi bagi peneliti. Diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi sesuai dengan sub fokus penelitian. Adapun uraian dari temuan peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi tata kelola pembiayaan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustho**

Implementasi meliputi proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggantian dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Mulyono, 2008). Sedangkan pembiayaan adalah sebuah proses untuk mendapatkan laba sebagai akibat dari pengeluaran yang telah diberikan dalam biaya atau nilai ekuivalen kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi untuk mendapatkan barang dan jasa (Supriyono, 2000). Manajemen pembiayaan pendidikan dengan demikian dituangkan ke dalam 4 (empat) komponen kerja; (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan dan (4) pengawasan.<sup>13</sup>

Adapun pembiayaan, karena sifatnya yang berorientasi kepada sumber pendanaan dan pembiayaan dituangkan ke dalam anggaran yang dapat disusun dengan bentuk sebagai berikut: Pertama, penganggaran perbutir (line budgeting system) yang menekankan pada pelaksanaan dan pengawasan dengan kurang memperhitungkan dan memperkirakan capaian hasil. Besar kecilnya biaya yang dipergunakan selalu disesuaikan dengan jatah atau alokasi dana yang ditetapkan. Kedua, penganggaran bentuk program (budgeting program). Bentuk ini merupakan reaksi terhadap anggaran perbutir yang mengabaikan capaian yang telah dan akan

---

<sup>13</sup> Ibid.

dicapai. Pada penganggaran bentuk program yang diperhatikan bukan berapa dana yang tersedia melainkan program dan hasil yang hendak dicapai .<sup>14</sup>

Secara makro, perencanaan anggaran pembiayaan di UIN Jakarta menggunakan penganggaran perbutir (line budgeting system) karena memiliki sumber-sumber pendidikan tinggi yang lebih luas dari UIN Malang. Sehingga mempermudah pembagian komposisi perencanaan anggaran ke masing-masing unit kerja pelaksana. Namun, secara mikro, UIN Jakarta menggunakan anggaran penampilan (performance budgeting) yang mengorientasikan anggaran kepada capaian tertentu, seperti misalnya memenuhi standar ISO, memenuhi standar akreditasi dan sebagainya.

**Tabel I**

**Implementasi Pembiayaan Pendidikan Satuan Pendidikan Muadalah(SPM) Wustho**

no	institusi	perencanaan	pengorganisasian	pelaksanaan	pengawasan
1	Satuan Pendidikan Muadalah(SPM) Wustho	Penganggaran per butir dan Penganggaran penampilan	Sentralisasi pada pimpinan tinggi (high management) dan lembaga audit internal	Realisasi penggunaan biaya mengacu kepada keputusan Rektor sebagai komando terpusat	Pola pengawasan/ evaluasi terpusat dan meliputi semua bidang pada semua lini (akademik, kepegawaian dan keuangan)
		Proses penyusunan perencanaan anggaran lebih cepat karena pagu anggaran	Apabila memiliki rencana strategis atau milestone yang jelas, komposisi anggaran tetap	Ada kemungkinan terjadi revisi berulang karena perubahan kebijakan di	Validasi kebijakan penggunaan anggaran menjadi sangat ketat dan rigid, namun memiliki tingkat

<sup>14</sup> Usep Setiawan and Eddy Suharyanto, “Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Implementasi Manajemen Tata Kelola Organisasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Layanan Pendidikan ( Studi Kasus Di STIKes RS Dustira Kota Cimahi Jawa Barat ).” 9, no. 3 (2023): 1037–1045.



		setiap tahun cenderung sama jumlahnya	dapat dituangkan ke dalam program berjangka (multi years	tingkat pimpinan tinggi Pengawasan	akuntabilitas yang tinggi
--	--	---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------

Praktik Implementasi pembiayaan Lembaga Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustho terhadap upaya menjaga keberlangsungan kegiatan lembaga pendidikan. Manajemen pembiayaan dilakukan dengan menerapkan tahapan-tahapan manajemen pembiayaan yang terdiri dari perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan evaluasi pembiayaan. Dengan manajemen pembiayaan, kegiatan dan program yang direncanakan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Efektif dimaksudkan bahwa rencana kegiatan dan rencana pendanaan terhadap kegiatan dapat dicapai dan bahkan mengalami surplus atau kelebihan dana. Efisien dimaksudkan bahwa rencana kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan berikut pendanaannya terdistribusi secara merata kepada para siswa siswi dan penanggungjawab kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki lembaga. Berkelanjutan dimaksudkan bahwa kelebihan atau sisa dana yang didapatkan pada akhir tahun masih dapat digunakan untuk berbagai kegiatan di tahun berikutnya untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.<sup>15</sup>

## Conclusion

Implementasi manajemen pembiayaan menjadi bagian penting dalam manajemen pengelolaan lembaga. Pengelolaan lembaga yang baik didukung dengan manajemen dan tata kelola sebagaimana aturan perundangan. Manajemen pembiayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aturan tersebut. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan dilaksanakan dengan strategi yang tepat dan sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Manajemen pembiayaan pesantren dilakukan dengan tiga tahapan, tahap perencanaan pembiayaan yang memperhatikan plafon anggaran pesantren, sumber pendapatan anggaran pesantren, sumber anggaran dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat, dan sumber-sumber lain yang legal dan halal. Tahap pelaksanaan pembiayaan menjadi bagian lanjutan dari perencanaan, dalam melaksanakan pembiayaan dilakukan perhatian terhadap pelaksanaan pendapatan, pelaksanaan pengeluaran, dan laporan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan pembiayaan mensyaratkan prinsip pembiayaan yang

<sup>15</sup> Nur Rahmi Sonia, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simdik) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (2020): 94–104.

terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), demikian itu menjadi suatu keharusan untuk menjaga kepercayaan pemberi dana dan masyarakat. Pada tahap terakhir yaitu, evaluasi pembiayaan pesantren. Evaluasi pembiayaan pesantren dilakukan oleh internal pesantren yaitu pimpinan dan bidang keuangan, serta oleh lembaga eksternal yang terpercaya untuk melakukan audit kegiatan dan audit keuangan. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengukur dan mengoreksi terhadap pelaksanaan pembiayaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Manajemen pembiayaan lembaga Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Wustho yang dilaksanakan berdampak pada pencapaian tujuan yang direncanakan dan keberlanjutan kegiatan pesantren. Keterlaksanaan dan keberlanjutan kegiatan merupakan elemen Penting yang tak terpisahkan dalam lembaga Pendidikan.

## References

- Hasibuan, Anggita Rizki Defiani. "Penerapan Tata Kelola Keuangan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Akhir Periode Tahun 2020." *Juripol* 4, no. 1 (2021): 304–309.
- Huda, Nurul. "Sistem Administrasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022): 16–31.
- Jaenudin, Jaenudin, Muhammad Nur Rianto Al Arif, and Iif Fikriyati Ihsani. "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum Pada Universitas Islam Negeri." *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 62.
- Masditou. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu." *Jurnal ANSIRU PAI* 1, no. 2 (2017): h. 130.
- Name, Charge, Tax Name, R T Revd, Luke Lungile, World Economic Forum, Tony Fitzpatrick, Lagrangian Method Modeling, et al. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. 2 (2021): 6.
- Setiawan, Usep, and Eddy Suharyanto. "Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Implementasi Manajemen Tata Kelola Organisasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Layanan Pendidikan ( Studi Kasus Di STIKes RS Dustira Kota Cimahi Jawa Barat )." 9, no. 3 (2023): 1037–1045.
- Sonia, Nur Rahmi. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simdik) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (2020): 94–104.